



Judul : Investasi Pangan Lebih Menjanjikan
Tanggal : Minggu, 28 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Ada Insentif Perpajakan Investasi Pangan Lebih Menjanjikan

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdulah optimistis ketiga kandidat capres dan cawapres bakal memperkuat fokus kebijakan pada sektor pangan dan energi hijau, ketika terpilih nantinya. Sebab, investasi pada sektor pangan dan energi hijau lebih menjanjikan.

"Saya kira investasi pada sektor pangan dan energi hijau menjanjikan imbal hasil yang baik. Apalagi kedua sektor itu didukung penuh oleh kebijakan, seperti insentif perpajakan, bea masuk, dan kemudahan kemudahan lainnya seperti perizinan," kata Said di Jakarta, kemarin.

Untuk sektor di luar pangan dan energi hijau, lanjutnya, kinerja investasi bakal melambat pada tahun ini. Investor menimbang kondisi pemilu yang memberikan ketidakpastian kelanjutan investasi.

"Saya perkirakan, investor akan menunggu, setidaknya setahun setelah pilpres. Artinya, baru tahun 2025 mereka melihat perkembangan konsolidasi kekuasaan di pemerintahan dan DPR. Sepanjang konsolidasi kekuasaan hasil pemilu 2024 belum terjadi, saya kira investor akan lebih menahan diri," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Dia bilang, bila target investasi pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, yakni dari Rp 1.400 triliun menjadi Rp 1.617 triliun, tidak akan mudah dicapai. Karena, adanya kondisi politik dalam negeri, kondisi global dengan ketegangan global di Timur Tengah yang makin meluas. Juga, perang Rusia dan Ukraina belum berakhir dan ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Timur juga akan menahan arus modal masuk ke Indonesia.

Menurut dia, investor global akan lebih memilih di negara negara konservatif dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Kebijakan suku bunga tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang belum terlihat akan berakhir kemung-

kinan bisa menyedot dolar AS bertahan di kampungnya.

Maka dari itu, dia berpendapat wajar bila Bank Dunia membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target APBN 2024. Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,9 persen, sementara asumsi makro di APBN 2024 sebesar 5,2 persen. "Akhirnya, saya pikir berat target investasi di tahun politik ini," tutur dia.

Said lalu menyoroti tidak adanya program swasembada beras di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Sebagai anggota DPR, yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral, serta tidak berbasis pada data yang benar," tutur Said.

Diketahui, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia dinilai selalu melakukan impor beras sepanjang tahun 2014 hingga 2023. Terbukti, Pemerintah Indonesia memutuskan melakukan Impor beras 844 ribu ton pada tahun 2014, 861 ribu ton pada tahun 2015. Tidak berhenti, impor beras melonjak signifikan menjadi 2,25 juta ton pada tahun 2018, dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 305 ribu ton.

Terakhir, kini impor beras pada tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini menandai bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan impor beras terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.

Kalau impor beras dikaitkan dengan bencana el nino, tentu tidak relevan. Bahwa benar pada tahun 2023 lalu, Indonesia mengalami el nino, musim kering yang agak panjang.

"Namun, masa ini berlangsung kurang dari 4 bulan, dan memang ada kebutuhan untuk menutup pasokan kebutuhan beras dalam negeri sebagai cadangan bila persawahan ada gagal panen," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. ■ KAL